



RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ini disusun mendasari Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disahkan Renana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 ini, diharapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batang, Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG

dr. DIDIET WISNUHARDANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 200604 1 013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2 . Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan
 Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2022 6

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan 40

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 Kesehatan 54

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 59

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 99

BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN 100

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 100

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ... 103

 3.3 Progran dan Kegiatan 117

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan 135

BAB V PENUTUP 136

LAMPIRAN TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah bidang kesehatan secara terencana melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024,

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 diintegrasikan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam menjalankan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah. Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Kabupaten Batang 2024 – 2026;
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*)

pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2024.

2. Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan di bidang kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah dengan melihat sumberdaya yang ada.
- b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang dalam pembangunan kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2024

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Dinas Kesehatan, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Dinas Kesehatan serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2021

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan kesehatan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2024

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan dari masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran Dinas Kesehatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

3.2. Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Dalam bab ini menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2024

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan.

b. Fungsi

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- 5) pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- 6) pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- 7) pengelolaan sumberdaya kesehatan;
- 8) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- 9) pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;

- 10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- 11) pengelolaan perijinan bidang kesehatan;
- 12) pelayanan teknis dan administrasi bidang kesehatan;
- 13) peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan;
- 14) penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan;
- 15) pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- 16) pengembangan manajemen bidang kesehatan;
- 17) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 18) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang kesehatan;
- 19) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- 20) menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- 21) pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta; dan
- 22) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

2. Organisasi dan Tata kerja

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :

- 1) Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Kejadian Luar Biasa;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - 3) Seksi Sumberdaya Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- h. Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sumber daya Dinas Kesehatan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang:

a. Berdasarkan unit eselon/jabatan

Eselon II	: 1
Eselon III	: 3
Eselon IV	: 13

b. Berdasarkan Bagian/Bidang/UPTD

Kepala Dinas	: 1
Sekretariat	: 29
Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan	: 18
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	: 21
Bidang Kesehatan Masyarakat	: 16
UPT Dinas Instalasi Gudang Farmasi	: 9
UPT Dinas Laboratorium Daerah	: 10
UPT Pusk (termasuk PTT dan kontrak)	: 1.188

Sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Batang (Dinas Kesehatan, Puskesmas) berdasarkan jenis tenaga kesehatan:

Tenaga Medis:

- Dokter Umum	: 45
- Dokter Gigi	: 14

Tenaga Paramedis :

- Perawat : 237
- Bidan : 509
- Perawat gigi : 21

Tenaga Kefarmasian :

- D III Farmasi/AA : 20
- Apoteker : 18

Tenaga Gizi : 34

Tenaga Kesehatan Masyarakat: 27

Tenaga Sanitasi : 26

Tenaga Teknis Medis :

- Pranata Laborat : 26
- Rekam medis : 21

2. Sarana Pelayanan Kesehatan

Keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang hampir merata, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan jenis sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang, yaitu :

- a. Rumah Sakit Pemerintah : 2 Swasta : 1
- b. Puskesmas dengan Rawat Inap : 4
- c. Puskesmas Rawat Jalan : 17
- d. Puskesmas Pembantu : 42
- e. Puskesmas Keliling/Ambulan : 53
- f. Poliklinik Kesehatan Desa : 181
- g. Instalasi Farmasi : 1
- h. Laboratorium Kesehatan Daerah : 1
- i. Balai Pengobatan/klinik : 23
- j. Apotik : 78
- k. Toko Obat : 6
- l. Praktek Dokter Perorangan : 143
- m. Praktek Pengobatan Tradisional : 35
- n. Unit Tranfusi Darah : 1
- o. Posyandu : 1.234

C. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2022 maka capaian

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan tahun 2022 berdasarkan tingkat realisasi / penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

Pendapatan asli daerah dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Laboratorium Kesehatan dan BLUD UPTD Puskesmas dari target yang ditetapkan Rp. 40.607.446.455,- pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 41.540.733.164,- (102,30%).

Sedangkan untuk anggaran belanja di Dinas Kesehatan dan Puskesmas tahun 2022 sebesar Rp.191.388.011.037,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 180.897.136.140,- dengan realisasi Rp.156.657.833.693 (86,60%). Belanja modal sebesar Rp. 10.490.874.897 dengan realisasi Rp.9.505.420.374,00 (90,07%).

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 39.863.000,- realisasi Rp. 32.347.000,- (81,14%).
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 203.001.500,- realisasi Rp. 166.224.000,- (81.88%).
- 3) Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 44.494.600,- realisasi Rp. 33.289.000,- (74,82%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.65.831.467.284,- realisasi Rp.63.928.183.927,- (97,11%).
- 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

- dengan anggaran sebesar Rp.549.485.000,- realisasi Rp. 529.465.500,- (91,11%).
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp.3.094.600,- realisasi Rp. 2.2.778.300,- (89,78%).
 - 4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.3.094.600,- realisasi Rp.2.749.000,- (88,83%).
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 0,- (0%).
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah..
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :
- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp.31.365.000,- realisasi Rp. 30.933.265,- (98,62%).
 - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp.116.397.250,- realisasi Rp. 111.022.849,- (95,38%).
 - 3) Penyediaan peralatan rumah tangga dengan anggaran sebesar Rp.37.865.000,- realisasi Rp.36.825.700,- (97,26%).
 - 4) Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp.121.650.000,- realisasi Rp.115.600.000,- (95,03%).
 - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 60.890.000,- realisasi Rp. 58.578.350,- (96,20%).
 - 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.3.000.000,- realisasi Rp. 1.920.000,- (64,00%).
 - 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 219.420.000,- realisasi

Rp. 180.720.340,- (82,36%).

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp.57.869.000,- realisasi Rp. 52.265.900,- (90,32%).

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000,- realisasi Rp.7.000.000,- (100%).

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 338.500.000,- realisasi Rp. 327.494.179,- (96,75%).

3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. dengan anggaran sebesar Rp.132.800.000,- realisasi Rp.120.191.633,- (90,51%).

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp.26.060.000,- realisasi Rp.14.547.100,- (90,51%).

2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp.468.211.600,- realisasi Rp.465.013.508,- (99,32%).

3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp.788.574.000,- realisasi Rp.739.984.214,- (93,84%).

4) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 71.060.000,- realisasi Rp. 70.040.000,- (98,56%).

- h. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan

anggaran sebesar Rp.47.605.395.288,- realisasi Rp.44.148.797.907,- (92.74%).

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pembangunan puskesmas dengan anggaran sebesar Rp.0,- realisasi Rp.0,- (0%).
- 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas dengan anggaran sebesar Rp.155.184.000,- realisasi Rp155.184.000,- (100%).
- 3) Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.386.350.000,- realisasi Rp. 384.350.000,- (99,48%).
- 4) Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.0,- realisasi Rp.0,- (0%).
- 5) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.2.064.671.300,- realisasi Rp.1.951.703.341,- (94,53%).
- 6) Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi dengan anggaran sebesar Rp.7.804.807.965,- realisasi Rp.119.879.950,- (1,54%).
- 7) Pengadaan obat, vaksin dengan anggaran sebesar Rp.4.394.327.923,- realisasi Rp.4.297.811.792,- (97,80%).

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terdiri dari 30 (tiga puluh) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, dengan anggaran sebesar Rp.2.086.798.908,- realisasi Rp. 1.156.050.500,- (55.40%).
- 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin, dengan

- anggaran sebesar Rp.544.044.000,- realisasi Rp. 132.597.500,- (24,37%).
- 3) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dengan anggaran sebesar Rp. 88.550.000,- realisasi Rp. 25.100.000,- (28.35%).
 - 4) Pengelolaan pelayanan kesehatan balita, dengan anggaran sebesar Rp.1.414.484.000,- realisasi Rp.722.590.000,- (51,09%).
 - 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, dengan anggaran sebesar Rp.950.439.900 realisasi Rp.602.856.600 (63,43%).
 - 6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, dengan anggaran sebesar Rp.2.803.383.000,- realisasi Rp.1.997.011.430,- (71,24%).
 - 7) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, dengan anggaran sebesar Rp. 106.635.300,- realisasi Rp. 76.754.500,- (71,99%).
 - 8) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dengan anggaran sebesar Rp.232.750.000,- realisasi Rp. 169.870.000,- (72,98%).
 - 9) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, dengan anggaran sebesar Rp.216.075.000,- realisasi Rp. 151.525.000,- (70,13%).
 - 10) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dengan anggaran sebesar Rp.121.402.500,- realisasi Rp. 45.975.000,- (37,87%).
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dengan anggaran sebesar Rp.846.945.780,- realisasi Rp.797.342.400,- (94,14%).
 - 12) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, dengan anggaran sebesar Rp.748.559.000,- realisasi Rp. 313.610.000,- (41,90%).
 - 13) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan anggaran sebesar Rp. 952.732.600,- realisasi Rp.489.873.112,- (51,42%).

- 14) Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.3.301.472.500,- realisasi Rp. 2.174.732.970,- (65,87%).
- 15) Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga, dengan anggaran sebesar Rp.430.946.500,- realisasi Rp. 131.091.300,- (30,42%).
- 16) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp.1.721.471.500,- realisasi Rp. 920.004.044,- (53,44%).
- 17) Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.609.015.870,- realisasi Rp.376.450.168,- (61,81%).
- 18) Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 11.325.000,- realisasi Rp.11.125.000,- (98,23%).
- 19) Pengelolaan surveilans Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.1.616.479.500,- realisasi Rp.656.652.235,- (40,62%).
- 20) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), dengan anggaran sebesar Rp.14.150.000,- realisasi Rp.310.000,- (2,19%).
- 21) Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA. dengan anggaran sebesar Rp. 37.900.000,- realisasi Rp. 34.700.000,- (91,56%).
- 22) Pengelolaan upaya kesehatan khusus. dengan anggaran sebesar Rp.1.904.851.040,- realisasi Rp.1.447.515.000,- (75,99%).
- 23) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. dengan anggaran sebesar Rp.1.340.118.855,- realisasi Rp.726.417.500,- (54,21%).
- 24) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.25.917.708.670,- realisasi Rp.25.846.109.513,- (99,72%).
- 25) Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional. dengan

anggaran sebesar Rp. 47.020.500,- realisasi Rp.45.194.000,- (96,12%).

26) Operasional pelayanan puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp.2.337.899.868,- realisasi Rp.644.068.944,- (27,55%).

27) Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya dengan anggaran sebesar Rp.235.052.400,- realisasi Rp.197.286.900,- (89,93%).

28) Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.185.696.000,- realisasi Rp.119.117.800,- (64,15%).

29) Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) dengan anggaran sebesar Rp.5.287.859.030,- realisasi Rp.4.727.957.500,- (89,41%).

30) Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah, dengan anggaran sebesar Rp.109.780.000,- realisasi Rp. 100.222.206,- (91,29%).

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi,

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1) Pengelolaan data dan informasi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 105.374.756,- realisasi Rp.79.948.700,- (75,87%).

2) Pengelolaan sistem informasi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- realisasi Rp.34.998.300,- (99,99%).

3) Pengadaan alat / perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet, dengan anggaran sebesar Rp.6.500.000,- realisasi Rp.5.994.550,- (92,22%).

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dengan anggaran

sebesar Rp.9.652.450,- realisasi Rp.6.232.450,- (64,57%).

- 2) Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. dengan anggaran sebesar Rp. 15.464.250,- realisasi Rp. 11.440.250,- (73,98%).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di Wilayah kabupaten/kota.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan. dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi Rp.15.000.000,- (100,00%).

- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumberdaya manusia kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.20.100.000,- realisasi Rp.18.559.300,- (92,33%).

- 2) Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.15.350.000,- realisasi Rp. 14.580.000,- (94,98%).

- 3) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, dengan anggaran sebesar Rp.2.102.688.000,- realisasi Rp. 2.065.047.120,- (98,21%).

- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah

kabupaten/kota dengan, anggaran sebesar Rp.89.520.000,-
realisasi Rp.86.326.900,- (96,43%).

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman.

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

a. Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan anggaran sebesar Rp.16.552.500,- realisasi Rp. 16.427.500,- (99,24%).
- 2) Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT), dengan anggaran sebesar Rp.8.599.800,- realisasi Rp. 8.524.000,- (99,12%).
- 3) Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan anggaran sebesar Rp.5.240.150,- realisasi Rp.5.224.500,- (99,70%).

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh industri Rumah Tangga.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga. dengan anggaran sebesar Rp.98.848.200,- realisasi Rp.65.956.600,- (66,73%).

c. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk

Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh industri Rumah Tangga.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) dengan anggaran sebesar Rp.23.006.000,- realisasi Rp.21.836.000,- (94,91%).

- d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan dengan anggaran sebesar Rp.0,- realisasi Rp.0,- (0,00%).

- e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp. 125.850.000,- realisasi Rp. 71.726.791,- (56,99%).
- 2) Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga, dengan anggaran sebesar Rp.237.926.000,- realisasi Rp.219.050.000,- (92,07%).

- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp 25.127.000,- realisasi Rp. 13.580.000,- (54,05%)

b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dengan anggaran sebesar Rp. 394.940.100,- realisasi Rp. 275.269.629,- (69,70%).

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan anggaran sebesar Rp.216.501.500,- realisasi Rp.174.193.500,- (80,46%).

2.2. **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 penetapan, Program, kegiatan dan sub kegiatan sudah mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, untuk pendapatan sebesar Rp.40.167.010.000, belanja sebesar Rp.162.512.444.347,- terurai dalam 5 program, 22 kegiatan dan 82 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik/hasil capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sedangkan untuk capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2022
Berdasarkan Hasil Pemetaan Program Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Kode	Program/kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
							Target Renja PD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	dokumen	5	4	1	8	5	5	100
1.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja	dokumen	5	4	1	1	5	5	100
1.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersusunnya laporan capaian kinerja	dokumen	5	4	1	1	5	5	100

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
1.02.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LKjIP	dokumen	5	4	1	2	5	5	100
				Tersusunnya LKPJ	dokumen	5	4	1	2	5	5	100
				Tersusunnya LPPD	dokumen	5	4	1	2	5	5	100
1.02.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat daerah	bulan	60	36	12	12	60	60	100
1.02.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji PNS, CPNS dan TTP	bulan	60	12	14	12	60	60	100
1.02.01.2.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	bulan	60	48	12	12	60	60	100
1.02.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	dokumen	5	4	1	1	5	5	100
1.02.01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	dokumen	5	4	1	1	5	5	100
1.02.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		bulan	60	36	12	12	60	60	100
1.02.01.2.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pegawai	orang	40	33	9	0	40	40	100
1.02.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	bulan	60	36	12	12	60	60	100
1.02.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	48	12	12	60	60	100

1.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	5	4	1	1	5	5	100
1.02.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	48	12	12	60	60	100
1.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	bulan	60	48	12	12	60	60	100
			Tersedianya makan dan minuman	bulan	60	48	12	9	60	60	100
1.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	48	12	12	60	60	100
1.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	48	12	12	60	60	100
1.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah	bulan	60	48	12	12	60	60	100
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	bulan	60	36	12	12	60	60	100
1.02.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	pkt	5	12	1	4	5	5	
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	60	36	12	12	60	60	100
1.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bulan	60	48	12	9	60	60	
1.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	48	12	12	60	60	100
1.02.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	36	12	12	60	60	100

1.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	48	12	12	60	60	100
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	60	36	12	12	60	60	100
1.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	bulan	60	48	12	12	60	60	100
1.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	bulan	60	48	12	12	60	60	100
			Terehabilitasinya kendaraan dinas/operasional	unit	10	6	2		10	9	90
1.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	pkt	5	9	2	2	5	5	100
			Meningkatnya keamanan kantor	bulan	60	48	12	9	60	60	100
1.02.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	60	36	12	12	60	60	100
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Puskesmas dengan PPK BLUD	%	100	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD di Puskesmas	pusk	100	21	21	21	100	100	100
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas	%	91	64	75	64	91	91	100
			Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas	%	2,7	1	1,5	1	2,7	2,7	100

					Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang	%	100	95	100	95	100	20	20
					Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang	%	20	100	100	100	100	0	0
					Ketersediaan jenis obat esensial	%	100	80	100	80	100	82,08	82,08
					Ketersediaan jumlah obat esensial	%	100	100	100	100	100	90,8	90,8
					Ketersediaan jenis obat generik	%	100	74	100	74	100	71,35	71,4
					Keersediaan jumlah obat generik	%	100	78	100	78	100	67,72	67,7
					Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	86,28	273,43	86,28	273	86,28	90	104
					Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	11,50	10,11	12	10	8,88	10	87,0
					Angka Kematian Balita (AKBA)	per 1.000 KH	15	11	15,1	11	10,96	10,96	73,1
					Persentase Berat Badan Lahir Rendah	%	4,9	5	5	5	4,9	4,9	100
					Persentase Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	%	11,5	11	8	11	11,5	11,5	100
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	100	94	100	94	100	95	95
					Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	99,8	99,8
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	%	100	99	100	99	100	99,4	99,4

					kesehatan bayi baru lahir sesuai standar								
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	80	100	80	100	85	85
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	48	100	48	100	90	90
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	62	100	62	100	90	90
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	35	100	35	100	65	65
					Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	95	100	95	100	100	100
					Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	82	100	82	100	90	90
					Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,84	75	74,7	75	74,84	74,84	100
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	64	100	64	100	91	91
					Angka Kesembuhan Pengobatan TB BTA +	%	90	84	89,5	84	90	71	78,9
					Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB	per 100.000 penduduk	234	101	109	101	234	74	31,6

					Persentase orang terduga Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	39	100	39	100	70	70
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	per 100.000 penduduk	100	104	100	104	100	46,19	46,19
					Angka Penemuan Kasus Kusta Baru	per 100.000 penduduk	4,03	4	8	4	4,03	4	99,3
					Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue	per 100.000 penduduk	49	3	42	3	49	48	97,96
					Angka Kesakitan Malaria	%	4	-	0,01	-	4	1	25
					Prevalensi Gizi buruk	%	0,3	0	0,16	0	0,3	0,3	100
					Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100	100	100	100
					Cakupan pemberian ASI eksklusif	%	70	63	50	63	70	70	100
					Persentase Rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	50	58	70	58	50	50	100
					Persentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan	%	100	70	82	70	100	100	100
					Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	%	98	100	100	100	98	96,21	98,2
					Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi puskesmas per jumlah penduduk	per 30.000 penduduk	1	1	1		1	1	100

1.02.02.2.01.02			Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya/penambahan ruang puskesmas	unit	0		5		0	0	0
				Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	unit	2	2			2	0	
1.02.02.2.01.09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terpeliharanya gedung puskesmas	unit	0	1	0		0	0	0
				Terpeliharanya gedung puskesmas pembantu	unit	0	6			0	0	0
1.02.02.2.01.12			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya ambulan/ puskesmas keliling/mobil jenazah	unit	0	7	3		0	0	0
				Jumlah mobil promosi kesehatan	unit	0	1			0	0	0
				Jumlah pengadaan kendaraan operasional kesehatan roda 2	unit	0	24			0	0	0
				Tersedianya mobil Vaksin	unit	0	1			0	0	0
				Pembangunan Gedung PSC 119	unit	0				0	0	0
				Perangkat sistem informasi dan komunikasi untuk PSC/SPGDT	paket	0	1			0	0	0
1.02.02.2.01.13			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya IPAL sesuai standar di puskesmas	paket	1		1		1	1	100
1.02.02.2.01.14			Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan untuk puskesmas	paket	4	5	1		4	4	100
1.02.02.2.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terkalibeasinya alat kesehatan di puskesmas	paket	21	2	1		21	21	100
1.02.02.2.01.16			Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar	paket	3	5	1		3	3	100
1.02.02.2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Persentase Puskesmas yang memberikan layanan	%	100	100	100	100	100	100	100

		UKP Rujukan Tingkat Daerah /Kota	kesehatan untuk UKM dan UKP								
1.02.02.2.02.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	251	100	100	100
			Cakupan kunjungan ibu nifas	%	100	100	99,95	141	100	99,97	99,97
1.02.02.2.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan persalinan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan persalinan di faskes	%	100	100	100	300	100	100	100
1.02.02.2.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan KN lengkap	%	100	100	99,35	141	100	99,4	99,4
			Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani	%	100	99	100	141	100	100	100
1.02.02.2.02.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang diberi pelayanan sesuai standar	balita	35.111	47.493	47.493	62.806	35.111	31.000	88,3
1.02.02.2.02.05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang mendapat pelayanan kesehatan (Penjaringan)	%	100	100	100	124	100	95	95
1.02.02.2.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan habis pake (Posbindu kit)	kit	279	210	42		279	252	90,3
			Jumlah warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	531,261	500	500.000	561.960	531,261	478.135	90000
1.02.02.2.02.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tersedianya lansia kit	kit	21	95	25		21	21	100

				Pelatihan kader posyandu lansia	orang	139	1	200	305.502	139	139	100
1.02.02.2.02.08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	219.182	208.115	208.115	127.970	219.182	142.468	65
1.02.02.2.02.09			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	11.658	15	15.000	16.669	11.658	11.658	100
1.02.02.2.02.10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	2.065	1.813	1.813	2.690	2.065	1.859	90,02
1.02.02.2.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif	%	90	91	91	156	90	70	77,8
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	orang	8.624	9	8.850	6.812	8.624	5.896	68,4
1.02.02.2.02.12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	orang	15.169	16.727	16.727	21.895	15.169	15.169	100
1.02.02.2.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penderita covid yang ditemukan	orang	2.103	2.103	28	1.985	2.103	129	6,1
1.02.02.2.02.15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi kurus yang mendapat PMT	%	85	85	85	300	85	85	100

				Remaja putri yang mendapatkan TTD	%	75	50	50	214	75	75	100
				Balita datang ditimbang (D/S)	%	80	85	85	242	80	80	100
				Persentase balita BGM	%	1,2	1	1	2	1,2	1,2	100
1.02.02.2.02.16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pos UKK (formal) yang dibina	%	100	25	25	123	100	100	100
1.02.02.2.02.17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya dokumen kondisi kesehatan lingkungan di Kab. Batang	dok	1	1	1		1	1	100
				Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	100	100	100	275	100	100	100
				Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (Jamban Sehat)	%	100	100	100		100	100	100
				Cakupan desa yang melaksanakan STBM	%	100	100	100	300	100	100	100
				persentase TTU yang dibina	%	100	100	100	288	100	80	80
1.02.02.2.02.18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pembuatan balliho	Buah	5	25	5		5	5	100

				Pembuatan film promkes	Film	0	100	2	1	0	0	0
				Pembuatan spot radio	Spot	0	20	4		0	0	0
1.02.02.2.02.19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	orang	12	45	25		12	12	100
				Terbentuknya asuhan mandiri taman obat keluarga	buah	5	8	5		5	5	100
1.02.02.2.02.20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	<i>Acute Flacid Paralysis (AFP) rate</i>	per 100.000 penduduk < 15 th	2	2	2	11	2	3,01	150,5
1.02.02.2.02.21			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	2.896	926	926	119	2.896	150	5,2
1.02.02.2.02.22			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan ketergantungan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan	orang	2	95	95	6	2	0	0
1.02.02.2.02.23			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya kegiatan PSC 119	bl	12	60	12	18	12	12	100
				Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kesehatan gigi	%	86	65	65	50	86	86	100

				Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi	%	45	85	85	143	45	45	100
				Tersedianya posko kesehatan pada saat lebaran	pos	7	6	6	12	7	7	100
1.02.02.2.02.25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani	%	100	100	100	300	100	100	100
				Anga kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue	%	1	<1	<1	8	1	1,6	160
1.02.02.2.02.26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN	jiwa	797.828	40	40.000	153.980	797.828	621.945	78
1.02.02.2.02.28			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spisemen penyakit potensial KLB yang dikirim ke laboratorium	spcmn	38	38	19	1.586	38	103	271
1.02.02.2.02.			Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase puskesmas mendapatkan BOK	%	100	100	100	300	100	100	100
1.02.02.2.02.34			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 21 puskesmas	%	100	100	100	300	100	100	100
1.02.02.2.02.35				Jumlah puskesmas direakreditasi	Pusk	21	21	6		21	21	100

			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.36			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) ⁸	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	99	99	99	145	99	47	47,5
				Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100	142	100	45	45
1.02.02.2.02.37			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya kegiatan epideiologi	kali	1.260	504	252	626	1.260	147	11,7
1.02.02.2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menggunakan sistem informasi berbasis teknologi Informasi (SIMPUS)	%	100	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.03.1			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tesusnya profil kesehatan Kab Batang	dok	1	2	1	1	1	1	100
1.02.02.2.03.2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya e logistik di IFK	bl	12	60	12	9	12	12	100
1.02.02.2.03.3			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terkoneksinya SIK dengan jaringan internet	%	100	100	100	300	100	100	100
1.02.02.2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan	Persentase sarana kesehatan yang berijin	%	100	100	100	98	100	100	100

		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota									
1.02.02.2.04.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terlaksananya visitasi dan monev Perijinan RS	kl	0	6	3	3	0	0	0
1.02.02.2.04.03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelaksanaan kegiatan visitasi dan monev perijinan klinik	kl	5	80	20	21	5	5	100
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	98	97	97	99	98	95,47	97,4
1.02.03.2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengajukan ijin (baru/perpanjangan)	orang	850	399	399	712	850	850	100
1.02.03.2.01.01		Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang tidak memperpanjang surat ijin tenaga kesehatan (Kadaluwarsa)	orang	80	35	35	40	80	8	2,5
1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Tersusunnya kebutuhan SDM	kl	2	2	1	1	2	2	100
1.02.03.2.02.01		Perencanaan dan distribusi serta Pemerataan sumber daya manusia Kesehatan	Tersusunnya kebutuhan SDM di tiap puskesmas	kl	2	2	1	3	2	2	100
1.02.03.2.02.03		Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Terlaksananya bimtek SDM	kl	2	2	1	3	2	2	4400

1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatnya kompetensi SDM	orang	100	165	85	60	100	88	80
1.02.03.2.03.01		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikut diklat	orang	100	50	10	43	100	80	80
01:02:04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	TAD	61	61	72	TAD	TAD	TAD
			Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	%	100	80	80	67	100	100	TAD
1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jaminan pemberian izin apotek, Toko obat, Toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Surat izin	TAD	47	15	67	TAD	TAD	TAD
1.02.04.2.01.01		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina	%	100	100	100	120	100	100	100
1.02.04.2.01.02		Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	Pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian	kl	128	233	118	144	128	128	100

		Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
1.02.04.2.01.03		Fasilitasi pemenuhan komitmen izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Bintek pengelola obat puskesmas	kl	7	8	4	5	7	7	100
1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat yang terbit untuk PIRT	sertifikat	TAD	234	120	210	TAD	TAD	TAD
1.02.04.2.03.01		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berijin yang dibina	%	60	56	56	90	60	60	100
1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah sertifikat laik higiene sanitasi TPM yang diterbitkan	sertifikat	100	150	90	15	100	80	80
1.02.04.2.04.01		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa	Persentase TPM yang dibina	%	100	100	100	240	100	80	80

		Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
1.02.04.2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan yang diterbitkan	stiker	0	152	82		0	0	0
1.02.04.2.05.01		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pengelola makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang dibina	pengelola	60	90	60		60	60	100
1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	%	100	100	100	100	100	80	80
1.02.04.2.06.01		Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Pemeriksaan laboratorium terakreditasi sampling dan pengujian PIRT	sampel	40	18	18	13	40	40	100
1.02.04.2.06.02		Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Tersedianya data perijinan PIRT	dok	1	2	1	4	1	1	100
01:02:05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Sisga Aktif Strata Mandiri	%	10,48	16	16,1	8	10,48	15	143
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS tatanan Rumah Tangga	%	92	88	88	187	92	90	97,8

1.02.05.2.02.01		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Terlaksananya Germas On CFD	kali	3	20	4	4	3	3	100
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Strata Mandiri	%	44	44	44	52	44	51	115,9
1.02.05.2.03.01		Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan	posyandu	1.233	1	1.230	3.693	1.233	1.233	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang, memberikan gambaran kondisi kualitas hidup dan status kesehatan masyarakat, dimana Angka Harapan Hidup selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari 74,56 pada tahun 2018, 74,59 pada tahun 2019, 74,69 pada tahun 2020 dan 74,74 pada tahun 2021. Sedangkan kondisi status kesehatan masyarakat, sebagaimana indikator sasaran menurunkan angka kematian dan kesakitan serta meningkatkan status gizi masyarakat, adalah :

1. Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2022 menunjukkan penurunan dari 273,43 per 100.000 kelahiran hidup (33 kasus) pada tahun 2021 menjadi 273,00 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022, angka ini masih diatas target tahun 2021 sebesar 94,13 per 100.000 kelahiran hidup dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 86,28 per 100.000 kelahiran hidup maupun angka Jawa Tengah sebesar 199,0 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan :
 - a. Kematian ibu maternal disebabkan adanya penyakit penyerta (bukan karena hal yang berkaitan langsung dengan kehamilan), misalnya jantung, TB, hipertensi, covid-19 dll.
 - b. Masih tingginya kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) sebesar 11% yang disebabkan masih adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu diwaktu hamil (nyirik).
 - c. Masih tingginya angka komplikasi kebidanan pada tahun 2022.
 - d. Masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur (yang memeriksakan K1 tetapi tidak dilanjutkan

sampai K4) sebanyak 6,36%, sehingga jika ada kelainan dalam kehamilannya tidak segera diketahui.

Upaya yang dilakukan :

- a. Mempersiapkan kesehatan calon ibu sedini mungkin, mulai pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan KUA untuk memberikan bimbingan pada calon pengantin.
- c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin.
- d. Melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan), dengan tenggang waktu, satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester ke dua dan dua kali pada trimester ketiga.
- e. Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada tenaga kesehatan.
- f. Melakukan bimbingan pada ibu hamil dan suami tentang perawatan kehamilan, melahirkan dan nifas dengan membentuk kelas ibu hamil dan kelas bapak.
- g. Persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (tidak di rumah atau Poliklinik Kesehatan Desa).
- h. Semua puskesmas (perawatan dan non perawatan) menyediakan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan.
- i. Meningkatkan sistem rujukan untuk ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi kebidanan ke rumah sakit.
- j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan khususnya bidan.
- k. Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK).
- l. Melakukan pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar.
- m. Melakukan audit maternal pada kasus kematian ibu untuk melakukan penelusuran kasus kematian ibu dan mencari tindak lanjut pelayanan kesehatan ibu yang lebih baik dan tidak terulang dikemudian hari.

- n. Melakukan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan melibatkan suami, keluarga dan masyarakat.
 - o. Melakukan kegiatan Batang Jateng Nginceng Wong Meteng (5 ng).
 - p. Melibatkan dan bekerja sama lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5 ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu-ibu di wilayah kerjaya.
 - q. Meningkatkan penyuluhan ibu hamil untuk penerapan protokol kesehatan dan PHBS.
2. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan peningkatan dari 9,45 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 10,11 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, Angka ini sudah di bawah target tahun 2021 sebesar 12,3 per 1.000 kelahiran hidup maupun target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup.
- Meskipun sudah mencapai target akhir periode renstra namun tahun 2021 menunjukkan peningkatan dan masih di atas angka Jawa Tengah sebesar 7,9 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk melakukan upaya-upaya penurunan AKB, yaitu :
- a. Mencegah terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan menjaga kesehatan ibu hamil dan memberikan PMT pada ibu hamil KEK.
 - b. Memberikan ASI setelah bayi lahir sampai bayi usia 6 bulan (ASI eksklusif) dan tidak memberikan makanan lain kecuali obat.
 - c. Melakukan pemeriksaan neonatus dan bayi sesuai standar.
 - d. Memberikan imunisasi dasar lengkap.
 - e. Melakukan audit perinatal pada kasus kematian bayi untuk menelusuri penyebab kematian sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

- f. Mengembangkan pelayanan kesehatan pada bayi dengan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).
 - g. Inisiasi Menyusui Dini selama satu jam.
 - h. Pemberian vit A pada bayi umur 6 bulan – 1 tahun.
 - i. Mengadakan pelatihan konselor ASI bagi tenaga kesehatan.
 - j. Melakukan pertemuan gerakan ASI Eksklusif bagi kader kesehatan
 - k. Melaksanakan pelatihan tatalaksana neonatus di semua puskesmas dengan peserta (Dokter, Bidan, Perawat) untuk menurunkan angka kematian akibat asfeksia.
 - l. Melaksanakan pertemuan lintas program dan lintas sektor dalam deteksi dini (tanda bahaya bayi).
 - m. Melakukan pelatihan Pemberian Makanan Bayi Balita (PMBA) untuk petugas gizi dan Bidan.
3. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan penurunan dari 11,56 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 10,94 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, Angka ini sudah di bawah target tahun 2021 sebesar 15,30 per 1.000 kelahiran hidup maupun target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 15,1 per 1.000 kelahiran hidup.
- Meskipun sudah mencapai target akhir periode Renstra namun masih di bawah angka Jawa Tengah sebesar 8,9 per 1.000 kelahiran hidup sehingga perlu dilakukan upaya penurunan AKABA, yaitu :
- a. Melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi lewat kegiatan posyandu.
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan balita dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
 - c. Memberikan imunisasi lanjutan.
 - d. Memberikan vitamin A setahun dua kali.
 - e. Meningkatkan pengetahuan ibu tentang perawatan balita dengan membentuk kelas ibu balita.

- f. Melakukan rujukan kasus balita gizi buruk dengan komplikasi penyakit ke rumah sakit.
- g. Melakukan audit perinatal pada kasus kematian bayi untuk melakukan penelusuran penyebab kematian sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
- h. Melakukan Setimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali setahun.
- i. Case Notification Rate (CNR) kasus Tuberculosis menunjukkan penurunan, dari 110,24 per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 87,88 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Angka ini masih di bawah target tahun 2021 sebesar 108 per 100.000 penduduk dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 109 per 100.000 penduduk.

Turunnya CNR disebabkan karena pandemic covid-19, dimana kegiatan penemuan penderita tuberculosa tidak dapat optimal, karena sumberdaya difokuskan pada penanganan covid-19

- 4. Angka kesembuhan pengobatan TB BTA positif (*CR/Cure Rate*) menunjukkan penurunan, dari 88,88% pada tahun 2020 menjadi 85,54% tahun 2021, Angka ini masih di bawah target tahun 2021 sebesar 89,3% dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 89,5%. Hal ini disebabkan :
 - a. Dengan adanya pandemi covid-19, menyebabkan penderita Tuberkolosa yang sedang dalam pengobatan takut ke puskesmas (tertular covid).
 - b. Kurangnya kesadaran penderita tuberculosa dalam mematuhi ketentuan dalam proses pengobatan (apabila sudah merasa enak badannya/nyaman, tidak melanjutkan minum obat/berhenti minum obat).

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja CR penderita TB BTA positif, yaitu :

- a. Memberikan penyuluhan pada penderita dan keluarga tentang penyakit TB dan proses pengobatannya.

- b. Menunjuk anggota keluarga untuk menjadi Pengawas/Pendamping Menelan Obat (PMO).
 - c. Melakukan deteksi dini pada penduduk yang mempunyai gejala penyakit TB sehingga penderita diketahui secara dini dengan kondisi belum parah.
5. Angka kesalitan Demam Berdarah Dengue (*Incidence Rate/IR*) menunjukkan penurunan, dari 34,34 per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 3,23 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Angka ini sudah di bawah target tahun 2021 sebesar 43 per 100.000 penduduk dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 42 per 100.000 penduduk.
- Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan IR DBD, yaitu :
- a. Melakukan penyuluhan pada masyarakat tentang penyakit DBD dengan berbagai media.
 - b. Membentuk jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanganan DBD.
 - c. Melakukan penyelidikan epidemiologi apabila ada kasus DBD.
 - d. Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PSN secara rutin di daerah endemis DBD.
 - e. Melakukan fogging focus pada lokasi KLB DBD.
 - f. Melakukan pemantauan jentik berkala oleh kader jumantik.
6. Angka penemuan kasus baru kusta menunjukkan penurunan, dari 4 per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 3,74 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Angka ini masih di bawah target tahun 2021 sebesar 7 per 100.000 penduduk dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 8 per 100.000 penduduk. Hal ini disebabkan :
- a. Terbatasnya tenaga pengelola program P2 Kusta, baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas.
 - b. Kurang optimalnya pencarian penderita baru di sekitar lingkungan penderita kusta (kontak tracing).

- c. Kegiatan pencarian penderita baru kusta tidak dapat optimal karena pandemi covid-19.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja penemuan kasus baru kusta, yaitu :

- a. Melakukan pencarian penderita pada keluarga dekat dengan penderita dan masyarakat dalam satu lingkungan dengan melibatkan kader kesehatan.
- b. Meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan program kusta, sehingga semua kegiatan tercatat dan dilaporkan.
- c. Memberikan pelayanan pengobatan bagi penderita kusta sesuai standart.

- 7. Angka kesakitan malaria menunjukkan penurunan, dari 0,001 pada tahun 2020 menjadi 0,000 tahun 2021. Angka ini sudah di bawah target tahun 2021 maupun target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 0,01 per 1.000 penduduk.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja *Annual Parasite Incidence* (API), yaitu :

- a. Melakukan Penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita, untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus malaria, mengingat Kabupaten Batang bukan daerah endemis malaria.
- b. Melakukan pengambilan darah penderita terduga penyakit malaria untuk diperiksa positip/negatip malaria.
- c. Melakukan pengobatan penderita.
- d. Menindak lanjuti temuan kasus malaria dari KKP pada orang-orang yang datang dari luar Jawa dengan pelacakan ke alamat penderita.

- 8. Prevalensi balita gizi buruk menunjukkan peningkatan, dari 0,17% pada tahun 2020 menjadi 0,21% pada tahun 2021, angka ini masih di atas target tahun 2021 sebesar 0,17% dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 0,16%.

Hal ini dikarenakan dengan kondisi pandemi covid-19 kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu tidak dapat berjalan

secara optimal, sehingga apabila terjadi balita gizi kurang tidak segera diketahui dan terlambat mendapatkan intervensi.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja prevalensi balita gizi buruk, yaitu :

- a. Meningkatkan penyuluhan pada ibu-ibu untuk menimbang balitanya ke posyandu se bulan sekali, untuk mengetahui tumbuh kembang balita.
- b. Memberikan PMT penyuluhan untuk balita yang ditimbang di posyandu.
- c. Memberikan intervensi pada balita kurus dengan pemberian PMT pemulihan.
- d. Memberikan perawatan pada ballita gizi buruk yang ditemukan.
- e. Melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui penimbangan tiap bulan di posyandu.
- f. Melaksanakan pelatihan kader dalam pemantauan dan penanganan tumbuh kembang anak.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub sebagaimana dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang

No.	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023 Semester 1	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	-	-	-	74,84	74,89	74,94	74,79	74,84	74,89	74,94	
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	-	-	-	160	136	112	105,62	125,74	136	112	
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	-	-	-	8,48	8,08	7,6	9,51	10,41	8,08	7,6	
4	Prevalensi balita stunting	%	-	-	-	13,87	13,72	13,61	11,30	10,39	13,72	13,61	
5	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%	-	-	-	87	89	90	85,79	91	89	90	
6	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar	%	-	-	-	71,42	80,95	90,47	57	57	80,95	90,47	
7	Persentase fasilitas kefarmasian yang sesuai standar	%	-	-	-	65	70	75	100	100	70	75	
8	Persentase desa siaga aktif strata Mandiri	%	-	-	-	10,48	11,69	13,31	15,3	15,3	11,69	13,31	
9	Nilai kepuasan masyarakat	Indeks	-	-	-	88,5	88,75	89,15	TAD	TAD	88,75	89,15	

10	Nilai saki Dinas Kesehatan	%	-	-	-	79	80	81	76	TAD	80	81	
11	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	%			-	100	100	100	91,41	46,97	100	100	
12	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (<i>Incidence Rate/IR</i>)	Per 100.000 Penduduk			-	22	21	20	48	24	21	20	
13	CNR semua kasus Tuberculosis/TB (<i>Case Notification Rate/CNR</i>)	Per 100.000 Penduduk			-	110	115	120	48	24	115	120	
14	Angka penemuan kasus baru kusta (<i>New Case Detection Rate/NCDR</i>).	Per 100.000 Penduduk			-	4	4,1	4,3	4,32	2,44	4,1	4,3	
15	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%			-	99,01	99,34	99,4	98	95,47	99,34	99,4	
16	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%			-	100	100	100	100	100	100	100	
17	Rasio posyandu mandiri terhadap balita	per 1000 balita			-	11,74	12,24	12,74	8,79	8,9	12,24	12,74	
18	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan	%			-	96	97	98	TAD	TAD	97	98	
19	Jumlah puskesmas terakreditasi	puskesmas			-	21	21	21	21	21	21	21	
20	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal	puskesmas			-	21	21	21	21	21	21	21	
21	Jumlah desa ODF	desa			-	118	139	160	79	104	139	160	
22	Jumlah kasus kematian ibu	kasus			-	20	17	14	12	7	17	14	

23	Jumlah kasus kematian bayi	kasus			-	106	101	95	108	58	101	95	
24	Jumlah kasus kematian balita	kasus			-	118	108	100	124	71	108	100	
25	Jumlah balita stunting	balita			-	5.600	5.500	5.400	4.118	4.657	5.500	5.400	
26	Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue	orang			-	175	170	165	372	183	170	165	
27	Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	orang			-	920	960	1.000	154	75	960	1.000	
28	Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	orang			-	31	33	35	34	18	33	35	
29	Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	dok			-	1	1	1	1	1	1	1	
30	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi			-	2	2	2	1	1	2	2	
31	Jumlah fasyankes yang berijin	Fasyankes			-	51	54	56	23	24	54	56	
32	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	orang			-	610	680	690	1285	513	680	690	
33	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	orang			-	100	130	170	24	30	130	170	
34	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	dokumen			-	1	1	1	2	2	1	1	
35	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	nakes			-	40	40	40	355	88	40	40	
36	Jumlah Apotek yang berijin	Apotik			-	72	73	74	78	80	82	74	

37	Jumlah Toko Obat yang berijin	Toko obat			-	4	4	4	4	4	6	4	
38	Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	Toko alkes/optikas			-	13	13	13	8	9	18	13	
40	Jumlah PIRT yang mendapatkat sertifikat	sertifikat			-	220	220	220	60	28	270	220	
41	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	TPM			-	420	440	460	693	715	575	460	
42	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	%			-	28	30	33	28	10	100	33	
43	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	desa			-	30	32	35	38	38	50	35	
44	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	dokumen			-	2	2	2	2	2	2	2	
45	Jumlah posyandu strata mandiri	posyandu			-	600	650	700	51	51	650	700	
46	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	orang	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar		-	13.100	13.200	13.300	11.704	5.139	13.200	13.300	
47	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	orang	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar		-	12.900	13.000	13.100	11.343	5.559	13.000	13.100	

48	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	orang	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	12.800	12.900	13.000	11.288	5.532	12.900	13.000	
49	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-	34.711	35.111	35.511	42.530	11.066	35.111	35.511	
50	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	112.550	112.600	112.650	110.527	55.115	112.600	112.650	
51	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	555.121	580.354	605.587	432.102	197.007	580.354	605.587	
52	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	75.000	80.000	85.000	85.493	43.966	80.000	85.000	
53	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan	-	212.409	212.515	212.621	121.846	70.070	212.515	212.621	,

			kesehatan sesuai standar										
54	Jumlah penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-	10.379	10.430	10.481	11.658	7.224	10.430	10.481	
55	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		-	1.839	1.853	1.867	1.871	878	1.853	1.867	
56	Jumlah orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	orang	Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		-	4.100	4.200	4.300	9.239	5.896	4.200	4.300	
57	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	orang	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		-	15.169	15.257	15.345	15.081	7.007	15.257	15.345	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dibidang kesehatan, maka masih banyak berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi yaitu diantaranya:

1. Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita di Kabupaten Batang, dimana dari tahun ke tahun meskipun menunjukkan penurunan namun angka tersebut masih fluktuatif tiap tahunnya dan masih di bawah angka Jawa Tengah.
2. Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dengan mobilitas penduduk yang tinggi antar wilayah, mempercepat sebaran penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan karena penyakit menular masih cukup tinggi, misalnya HIV/AIDS dan DBD, Tuberculosis.
3. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdampak pada masalah kesehatan.
4. Cakupan rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih di bawah target, hal ini karena masih ada beberapa indikator yang sulit di capai, yaitu kebiasaan merokok, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
5. Kondisi geografis beberapa wilayah (pegunungan) menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
6. Masih adanya budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat program kesehatan. Misalnya pertolongan persalinan tidak di fasyankes, sebagian masyarakat belum menerima program imunisasi, tidak mau menyusui, pantang makanan tertentu baik pada masa kehamilan maupun saat menyusui dll.
7. Kesadaran sektor lain bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan masih rendah, hal ini mengakibatkan kurangnya dukungan sektor lain terhadap pembangunan kesehatan.

8. Terbatasnya tenaga kesehatan terutama tenaga dokter spesialis kebidanan, hal ini mengakibatkan terlambatnya penanganan pada kasus-kasus kebidanan.
9. Terbatasnya tenaga kesehatan di puskesmas, menjadi beban ganda dalam masa pandemi covid 19. (jumlah tenaga terbatas sementara harus melayani penderita covid dengan resiko tertular sehingga harus menjalani isolasi, dengan demikian tenaga kesehatan yang bertugas semakin berkurang).
10. Sistem informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih belum optimal, terutama akses informasi, ketepatan, akurasi, kecepatan dan kelengkapan.

Selain beberapa kendala dan hambatan yang ada, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang harus dihadapi pada masa mendatang, yaitu diantaranya :

1. Peluang.
 - a. Dukungan kebijakan dari pemerintah (peraturan perundangan)
 - 1) Terdapatnya peraturan perundangan yang terkait dengan kesehatan diantaranya :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
 - c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Terdapatnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Terdapatnya komitmen global, nasional, regional yang menyakuti kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan.

- 1) Komitmen Global *Millenium Development Goal's* (MDGs) terdiri dari delapan point komitmen, lima diantaranya terkait langsung dengan kesehatan yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, menurunkan kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, upaya memerangi penyebaran terhadap penyakit (khususnya HIV/AIDS, Malaria, Tuberculosis dan penyakit lain) dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kemudian dilanjutkan dengan SDGs.
- 2) Komitmen global terhadap dunia bebas penyakit polio. Badan Kesehatan Dunia (WHO, 1988) mencanangkan program Eradikasi Polio (*The Global Polio Eradication Initiative*) yaitu pemusnahan polio dari bumi.
- 3) Komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesehatan diimplementasikan pada pelaksanaan pembangunan nasional dengan menggunakan konsep paradigma sehat, yang dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Maret 1999, sebagai Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
- c. Dukungan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, hal ini diwujudkan dengan berkembangnya kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang meliputi (Posyandu, Poskestren, Poliklinik Kesehatan Desa dll) dan pengembangan Desa Siaga.

2. Tantangan

Selain adanya beberapa peluang ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, yaitu :

- a. Adanya potensi bencana alam dan musibah masal.
Kondisi geografis wilayah Kabupaten Batang yang terdiri dari perbukitan, dataran tinggi, hutan, laut dan kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik memunculkan potensi terjadinya bencana dan musibah masal.
- b. Kabupaten Batang yang terletak di jalur pantura merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan beberapa kota yang merupakan

tempat peristirahatan para pengemudi, serta kota pelabuhan, kondisi ini sangat beresiko terhadap perkembangan kasus HIV/AIDS dan penyakit memular lainnya.

- c. Adanya daerah endemis dan penyakit potensial wabah.
Kabupaten Batang merupakan daerah endemis DBD, sehingga penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Batang masih menjadi masalah dan ancaman bagi masyarakat.
- d. Masih tingginya kasus gizi buruk (dengan indikator berat badan menurut tinggi badan), hal ini perlu mendapatkan perhatian.
- e. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka ini menunjukkan peningkatan dan masih di atas target renstra juga masih di atas Jawa Tengah.
- f. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) meskipun sudah menunjukkan penurunan, namun angka ini masih di atas angka Jawa Tengah.
- g. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.
Sebagai gambaran kualitas kesehatan lingkungan maka dapat dilihat dari cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan yang masih 57,90%.
- h. Masih banyaknya penduduk miskin.
Kemampuan ekonomi masyarakat Batang masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan/mengakses pelayanan kesehatan rujukan, sehingga masyarakat cenderung mencari pelayanan pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak dibawah pengawasan tenaga kesehatan, sementara kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan juga belum baik.
- i. Semakin banyaknya perdagangan/peredaran makanan dan minuman dalam masyarakat, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.
- j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

k. Pandemi covid-19 yang belum mereda.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis kesehatan di Kabupaten Batang antara lain adalah :

1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKBA).
2. Masih adanya kasus gizi kurang pada balita dan ibu hamil, hal ini berdampak pada angka kematian ibu dan bayi.
3. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat. Penyakit-penyakit menular/infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti diabetes melitus (DM), kardiovaskular dan kanker cenderung meningkat.
4. Adanya pendemi covid 19 yang belum berakhir.
5. Kualitas lingkungan masih rendah. Cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih dan proporsi rumah yang memenuhi syarat kesehatan masih di bawah angka Jawa Tengah.
6. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat masih belum optimal. Kebiasaan cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar belum membudaya dan kebiasaan merokok dimasyarakat masih tinggi, perilaku pemberian ASI eksklusif pada bayi masih rendah, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum membudaya.
7. Belum optimalnya penanganan kejadian luar biasa (KLB) termasuk bencana. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.
8. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal, kondisi antara lain disebabkan jumlah dan kualitas sumberdaya kesehatan belum memadai, seperti jumlah sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan

palayanan gawat darurat masih terbatas, jumlah puskesmas dengan rawat inap yang masih terbatas.

9. Partisipasi/peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal/masih rendah (posyandu, pemberantasan sarang nyamuk, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pengembangan desa siaga).
10. Masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Batang, perlu dilaksanakan pengembangan jaminan kesehatan nasional, dengan melakukan advokasi dan sosialisasi untuk pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).

Sistem perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan belum optimal dan belum terpadu karena dukungan informasi kesehatan yang kurang memadai, baik ketepatan, keakuratan maupun kelengkapan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024.

Sedangkan untuk Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Batang

No. Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan	%	97	111.026.827.779	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan	97	111.026.827.779	
	-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dok	8	307.346.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8	307.346.500	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	2	41.385.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	41.385.000	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	208.701.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	208.701.500	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	57.260.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	57.260.000	
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang disusun	Dok	2	64.634.404.490	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2	64.634.404.490	
		-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bl	820	64.147.365.290	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	820	64.147.365.290	
		-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok	1	480.850.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	480.850.000	

		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	3.094.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkes	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	3.094.600	
		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	1	3.094.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinkes	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1	3.094.600	
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	dokumen	14	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	14	30.000.000	
		-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	org	15	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	15	30.000.000	

				perundang-undangan						perundang-undangan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	paket	3	536.167.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	3	536.167.250	
		-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	31.365.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	31.365.000	
		-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	131.397.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	131.397.250	
		-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	37.865.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	37.865.000	
		-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	121.650.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	121.650.000	

		-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	60.890.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	60.890.000	
		-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dok	3	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	3.000.000	
		-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	150.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	5	57.869.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinkes	Jumlah pengadaan barang milik daerah	5	57.869.000	
		-	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	5	57.869.000	Pengadaan Mebel	Dinkes	Jumlah paket mebel yang disediakan	5	57.869.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan	jenis	6	669.455.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Dinkes	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan	6	669.455.000	

				daerah yang tersedia				Pemerintahan Daerah		daerah yang tersedia			
		-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	7.000.000	
		-	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	494.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	494.100.000	
		-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	35.555.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	35.555.000	
		-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	132.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	132.800.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	53	877.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Dinkes	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	53	877.500.000	

								Pemerintahan Daerah					
		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	3	78.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	78.000.000	
		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	49	323.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	49	323.440.000	
		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	425.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	425.000.000	

		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	51.060.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	51.060.000	
		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Ha			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Dinkes	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi			
		Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	Pusk	21	43.914.085.539	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pusk	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21	43.914.085.539	
		-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	Unit Kerja	21	43.914.085.539	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk	Jumlah layanan puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21	43.914.085.539	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	50.991.362.071	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes, Pusk	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	100	50.991.362.071	

				Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (incidence Rate/IR)	Per 100.000 Penduduk	21				Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (incidence Rate/IR)	21		
				CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR).	Per 100.000 Penduduk	115				CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR).	115		
				Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR).	Per 100.000 Penduduk	4,1				Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR).	4,1		
	-	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah puskesmas terakreditasi	Unit	21	5.227.777.400	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Dinkes, Puskesmas	Jumlah puskesmas terakreditasi	21	5.227.777.400	
		-	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	unit	1	1.050.000.000	Pembangunan Puskesmas	Limpung	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	1	1.050.000.000	
									Blado II				

		-	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	unit			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Labkesd a	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
		-	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit			Pengembangan Puskesmas	Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar			
		-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terpeliharanya gedung puskesmas	Unit	3	1.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas	Terpeliharanya gedung puskesmas	3	1.000.000.000	
		-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah sarana , prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	1	200.000.000				1	200.000.000	
		-	Pengadaan Sarana Fasilitas	Tersesianya ambulan roda empat dan roda dua	unit	3	600.000.000	Pengadaan Sarana Fasilitas	Puskesmas	Tersesianya ambulan roda empat dan roda dua	3	600.000.000	

			Pelayanan Kesehatan					Pelayanan Kesehatan					
		-	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	4	400.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	4	400.000.000	
		-	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	3	200.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes, Puskesmas	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3	200.000.000	
		-	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket	4	1.477.277.400	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	4	1.477.277.400	
		-	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	paket	1	50.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1	50.000.000	
		-	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	unit	1	30.000.000				1	30.000.000	

		-	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit	371	220.500.000	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	371	220.500.000	
	-		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah /Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal	Pusk	21	45.524.867.871	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinkes,Pusk	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal	21	45.524.867.871	
				Jumlah desa ODF	desa/kelurahan	139				Jumlah desa ODF	139		
				Jumlah kasus kematian ibu	orang	17				Jumlah kasus kematian ibu	17		
				Jumlah kasus kematian bayi	bayi	101				Jumlah kasus kematian bayi	101		
				Jumlah kasus kematian balita	balita	108				Jumlah kasus kematian balita	108		
				Jumlah balita stunting	balita	5.500				Jumlah balita stunting	5.500		

				Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue	orang	170				Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue	170		
				Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	orang	960				Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	960		
				Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	orang	33				Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	33		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13.200	2.112.298.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes, Pusk	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.200	2.112.298.000	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13.000	830.298.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes, Pusk	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.000	830.298.500	

		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	12.900	181.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes, Pusk	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12.900	181.800.000	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	35.111	1.468.234.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes, Pusk	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.111	1.468.234.000	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	112.600	1.012.154.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes, Pusk	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	112.600	1.012.154.600	

		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlaj penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrinnng kesehatan sesuai standar	orang	580.354	1.130.623.750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinkes, Pusk	Jumlaj penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrinnng kesehatan sesuai standar	580.354	1.130.623.750	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	80.000	322.714.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinkes, Pusk	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80.000	322.714.500	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	212.515	257.925.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinkes, Pusk	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	212.515	257.925.000	

		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	10.430	247.090.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinkes, Pusk	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10.430	247.090.000	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	1.853	152.777.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinkes, Pusk	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.853	152.777.500	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	4.200	229.870.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes, Pusk	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4.200	229.870.000	

		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	15.257	197.155.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinkes, Pusk	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	15.257	197.155.000	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	1	2.446.241.163	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	2.446.241.163	

		-	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Dokumen	1	10.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1	10.000.000	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	1	1.905.000.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	1.905.000.500	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Dokumen	1	457.009.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	1	457.009.500	

		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	1	1.872.966.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	1.872.966.500	
		-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	1	979.483.520	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1	979.483.520	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Dokumen	1	28.946.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	1	28.946.500	
		-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	Dokumen	1	1.613.421.180	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1	1.613.421.180	

				surveilans kesehatan						surveilans kesehatan			
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	100	32.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes, Pusk	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	32.750.000	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	4	36.725.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes, Pusk	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4	36.725.000	
		-	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Dokumen	1	835.250.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	1	835.250.000	

		-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2	1.404.876.700	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2	1.404.876.700	
		-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	1	19.350.108.458	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1	19.350.108.458	
		-	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Paket	8	25.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Pusk	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	8	25.000.000	
		-	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan	Dokumen	1	9.000.000				1	9.000.000	

				kabupaten/kota sehat									
		-	Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Unit	2	180.500.000				2	180.500.000	
		-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Dokumen	21	3.099.673.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	21	3.099.673.000	
		-	Operasional Pelayanan Fasilitas	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Dokumen	6	310.033.000	Operasional Pelayanan Fasilitas	Dinkes,	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	6	310.033.000	

			Kesehatan Lainnya					Kesehatan Lainnya					
		-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	27	1.639.832.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinkes,	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	27	1.639.832.000	
		-	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	175.600.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinkes, Pusk	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2	175.600.000	
		-	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Dokumen			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah			

		-	Pennediaan dan pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) yang terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	849.800.000			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) yang terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	849.800.000	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosa mendapatkan pelayanan	orang		119.710.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Dinkes, Pusk	Jumlah orang dengan Tuberkulosa mendapatkan pelayanan		119.710.000	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV mendapatkan pelayanan	orang			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Dinkes, Pusk	Jumlah orang dengan HIV mendapatkan pelayanan			
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah penderita malaria yang ditemukan dan ditangani	orang			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Dinkes, Pusk	Jumlah penderita malaria yang ditemukan dan ditangani			

		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	Dokumen	1	210.216.800	Penyelenggara n Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	1	210.216.800	
				Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2				Jumlah aplikasi yang dikelola	2		
		-	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Dokumen	1	75.000.000	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	1	75.000.000	
		-	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	118.216.800	Pengelolaan sistem snformasi kesehatan	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1	118.216.800	

		-	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	unit	1	17.000.000	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Dinkes,	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	1	17.000.000	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Fasyankes yang berijin	Fasyankes	54	28.500.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinkes,	Jumlah Fasyankes yang berijin	54	28.500.000	
		-	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Unit	45	11.500.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Dinkes,	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	45	11.500.000	

		-	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Unit	24	17.000.000	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Dinkes,	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	24	17.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			<i>Persentase tenaga kesehatan yang berijin</i>	%	99,34	490.440.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinkes,	<i>Persentase tenaga kesehatan yang berijin</i>	99,34	490.440.000	
	-	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota		Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	orang	680	251.990.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Dinkes,	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	680	251.990.000	
				Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	Orang	130				Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	130		

		-	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	dokumen	1	15.000.000	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1	15.000.000	
		-	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	dokumen	1	236.990.000	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	1	236.990.000	
	-	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota		Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	dokumen	1	128.100.000	Pendetayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Dinkes,	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	1	128.100.000	

		-	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	dokumen	1	20.100.000	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	1	20.100.000	
		-	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	Orang	2.020	108.000.000	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Dinkes,	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	2.020	108.000.000	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	nakes	40	110.350.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinkes,	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	40	110.350.000	

		-	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikut diklat	Orang	40	110.350.000	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Dinkes,	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikut diklat	40	110.350.000	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			<i>Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin</i>	%	100	620.726.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>Dinkes,</i>	<i>Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin</i>	100	620.726.000	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Apotek yang berijin	Surat Apotik	73	101.900.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Dinkes,	Jumlah Apotek yang berijin	73	101.900.000	

							Tradisional (UMOT)					
				Jumlah Toko Obat yang berijin	Toko obat	4			Jumlah Toko Obat yang berijin	4		
				Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	Toko alkes/optikas	13			Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	13		
		-	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	127	47.900.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	127	47.900.000

		-	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	127	54.000.000	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes,	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	127	54.000.000	
--	--	---	--	--	--------	-----	------------	--	---------	---	-----	------------	--

		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat	sertifikat	220	204.386.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes,	Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat	220	204.386.000	
--	--	--	--	-------------------	------------	--------------------	--	----------------	--	------------	--------------------	--

		-	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Dokumen	70	204.386.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	70	204.386.000	
--	--	---	---	--	---------	----	-------------	---	---------	--	----	-------------	--

		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	TPM	440	44.500.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes,	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	440	44.500.000	
		-	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran	dokumen	1	44.500.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran	Dinkes,	Jumlah produk dan sarana produksi makanan- minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	1	44.500.000	

			dan Depot Air Minum (DAM)	dan Depot Air Minum (DAM)				dan Depot Air Minum (DAM)					
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	PIRT	30	269.940.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinkes,	Persentase hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	30	269.940.000	
		-	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan- minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	unit	76	132.140.000	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Dinkes,	Pemeriksaan laboratorium terakreditasi sampling dan pengujian PIRT	76	132.140.000	

		-	Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Tersedianya data perijinan PIRT	dok	1	137.800.000	Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Dinkes,	Tersedianya data perijinan PIRT	1	137.800.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			<i>Rasio posyandu mandiri terhadap balita</i>	per 1000 balita	12,24	629.650.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Dinkes,</i>	<i>Rasio posyandu mandiri terhadap balita</i>	12,24	629.650.000	
		Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	Desa	32	75.000.000	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	32	75.000.000	
		-	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1	75.000.000	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan		Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	1	75.000.000	

			pemberdayaan masyarakat					pemberdayaan masyarakat					
			Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	dokumen	2	328.750.000	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	2	328.750.000	
		-	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	dokumen	1	328.750.000	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1	328.750.000	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	posyandu	650	225.900.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinkes,	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	650	225.900.000	

		-	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	225.900.000	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	225.900.000	
			JUMLAH				163.759.005.850					163.759.005.850	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Masyarakat

Bahwa proses perencanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dimulai dari kegiatan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan musrenbang kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat, yang merupakan kondisi riil kebutuhan masyarakat.

Dari hasil proses tersebut dipadukan dengan dokumen renstra SKPD Dinas Kesehatan serta memperhatikan kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan baik dari tingkat pusat, regional dan lokal.

Sedangkan untuk usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari dana aspirasi dewan tahun 2024 tidak ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bersih dan sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, dengan sasaran strategis :
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan sasaran strategis :
Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan sasaran strategis :
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya kesehatan, dengan sasaran strategis:
 - a. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
 - b. Meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.

- c. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.
- 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Indikator sasaran strategis RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, adalah :

1. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup), sebesar 183.
2. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), sebesar 16.
3. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek), pada balita (%) sebesar 14.
4. Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%), sebesar 7.
5. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV), sebesar 0,18.
6. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk), sebesar 190
7. Eliminasi malaria (kabupaten/kota), sebesar 405.
8. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%), sebesar 8,7.
9. Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%), sebesar 21,8.
10. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 - 23 bulan (%), sebesar 90.
11. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%), sebesar 100.
12. Persentase rumah sakit terakreditasi (%), sebesar 100.
13. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%), sebesar 83.
14. Persentase puskesmas tanpa dokter (%), sebesar 0.

15. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%), sebesar 96.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator yang harus dicapai kabupaten/kota, yaitu :

1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sebesar 100%.
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 100%.
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%.
4. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%
5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
6. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
7. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
8. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
9. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
10. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 100%.
11. Persentase orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar sebesar 100%.
12. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deeksi dini HIV sesuai standar sebesar 100%.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024, mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan status kesehatan masyarakat, dengan indikator Angka Harapan Hidup sebesar 74,09 tahun.

Sasarannya adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian, dengan indikator :

- 1) Angka kematian ibu, sebesar 108 per 100.000 kelahiran hidup.
- 2) Angka kematian bayi, sebesar 11,30 per 1.000 kelahiran hidup.
- 3) Angka kematian balita, sebesar 10,45 per 1.000 kelahiran hidup.
- 4) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebesar 57%
- 5) Persentase penemuan dan pelayanan kesehatan penderita PTM dan kesehatan jiwa sebesar 55%.
- 6) Persentase respon cepat pelayanan kesehatan < 24 jam dalam penanggulangan KLB/bencana sebesar 100%.
- 7) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan sebesar 51%.
- 8) Persentase capaian SPM RSUD dan RSJD Provinsi sebesar 37,14%.
- 9) Indek Keluarga Sehat Wilayah Provinsi sebesar 0,30%

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan, sasaran, kebijakan strategi, program dan kegiatan Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka

merealisasikan tujuan dan sasaran. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehan, maka untuk mewujudkan tujuan ke satu dari RPD yaitu “Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan” dengan Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka Tujuan dari RENJA Dinas Kesehatan, yang merupakan tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 adalah

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang, dengan indikator Angka Harapan Hidup sebesar 74,84 tahun.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 88,50%.

Denagan sasaran meliputi :

1. Menurunnya Angka Kematian dan Meningkatnya status gizi Masyarakat melalui peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan Kesehatan, dengan indicator :
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 160 per 100.000 kelahiran hidup.
 - b. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 8,48 per 1.000 kelahiran hidup.
 - c. Angka prevalensi balita stunting sebesar 13,87%
 - d. Persentase penduduk yang mempunyai jaminan Kesehatan sebesar 87%.

- e. Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar sebesar 71,42%.
 - f. Persentase fasilitas kefarmasian yang sesuai standar sebesar 65%.
 - g. Persentase desa sisga aktif strata mandiri sebesar 10,48%.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 79%

Sedangkan untuk Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan sebagaimana dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang	Angka Harapan Hidup	74,89 Tahun	Menurunkan Angka Kematian dan Meningkatkan status gizi Masyarakat melalui peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	136 per 100.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan puskesmas
					Angka Kematian Bayi (AKB)	8,08 per 1.000 KH			Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
					Angka prevalensi balita stunting	13,72%			Pengembangan puskesmas
					Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	89%			Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
									Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
									Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
									Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
									Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
									Pengadaan obat, vaksin
									Pengadaan Bahan Habis Pakai

									Pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan
								Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kab/kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
									Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
									Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
									Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
									Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
									Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
									Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
									Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
									Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
									Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kKejadian Luar Biasa (KLB)
									Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan
									Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
									Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
									Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
									Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
									Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
									Pengelolaan surveilans kesehatan
									Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
									Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA

									Pengelolaan upaya kesehatan khusus
									Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
									Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
									Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional
									Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
									Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan
									Operasional pelayanan puskesmas
									Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
									Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
									Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
									Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
									Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
									Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria
									Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
								Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan data dan informasi kesehatan
									Pengelolaan sistem informasi kesehatan
									Pengadaan alat/perang kat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet
								Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
									Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
					Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar	80,95%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
									Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan

								Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan
									Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
									Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
								Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
					Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar	70%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

									Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut Pengawasan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
									Facilitasi pemenuhan komitmen izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
								Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh industri Rumah Tangga
								Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

								Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
								Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
									Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga
				Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan	Persentase Desa Sisga Aktif Strata Mandiri.	11,69%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehata	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
								Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	88,75%	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
									Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
									Evaluasi kinerja perangkat daerah
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
									Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
									Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
									Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tri wulanan /semesteran SKPD
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
									Penyediaan peralatan rumah tangga
									Penyediaan bahan logistik kantor
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
									Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan mebel
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
									Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
									Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
									Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
									Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
									Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
									Pemeliharaan/rehabilitasi tanah
								Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain :

- Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Batang.
- Pencapaian SDGs.
- Pencapaian Standar Pemayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Pencapaian program nasional dan regional.

b. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2024,

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 22 kegiatan dan 90 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran Rp. 163.387.841.766,- , bersumber dari :

- Dana Alokasi Umum, sebesar Rp. 78.715.927.540,-
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas, sebesar Rp.40.097.010.000,-
- Dana DBHCHT, sebesar Rp. 848.000.000,-
- Dana Pajak Rokok, sebesar, Rp. 17.500.000.000,-
- Dana Insentif Daerah, sebesar Rp. 1.642.334.300,-
- Dana Alokasi Khusus, sebesar Rp. 24.584.569.926,-

c. Kesesuaian rancangan awal renja dengan rumusan program kegiatan, sub kegiatan.

Secara keseluruhan rancangan awal renja dengan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada beda.

d. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2024, sebagaimana dalam tabel 3.2

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan	%		125.100.228.491	DAU/BLUD			111.875.519.769
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dok	8	246.946.000	DAU		8	307.346.500
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	2	41.385.000	DAU		2	41.385.000
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	124.301.000	DAU		2	208.701.500

		-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	81.260.000	DAU		4	57.260.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan yang disusun	dok	2	77.421.380.803	DAU		2	64.521.118.781
		-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	820	76.934.341.603	DAU		820	64.034.079.581
		-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	480.850.000	DAU		1	480.850.000
		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	3.094.600	DAU		1	3.094.600
		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	Dok	1	3.094.600	DAU		1	3.094.600
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	dokumen	14	30.000.000	DAU		14	30.000.000
		-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-Undangan	org	15	30.000.000	DAU		15	30.000.000

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	paket	3	636.167.250	DAU		3	536.167.250
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	31.365.000	DAU		1	31.365.000
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	231.397.250	DAU		1	131.397.250
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	37.865.000	DAU		1	37.865.000
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	121.650.000	DAU		1	121.650.000
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	60.890.000	DAU		1	60.890.000
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	3	3.000.000	DAU		3	3.000.000
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	150.000.000	DAU		1	150.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	5	94.930.200	DAU		5	57.869.000
		- Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	5	94.930.200	DAU		5	57.869.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jenis	6	969.455.000	DAU		6	669.455.000

		-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	7.000.000	DAU		1	7.000.000
		-	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	494.100.000	DAU		1	494.100.000
		-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	35.555.000	DAU		1	35.555.000
		-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	432.800.000	DAU		1	132.800.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	54	825.286.000	DAU		54	877.500.000
		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	3	30.000.000	DAU		3	78.000.000
		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	49	371.440.000	DAU		49	323.440.000
		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	372.786.000	DAU		1	425.000.000

		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	51.060.000	DAU		1	51.060.000
		-	Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Ha						
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang menerapkan PPK BLUD	Unit Kerja	22	44.876.063.238	BLUD		22	44.876.063.238
		-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	22	44.876.063.238	BLUD		22	44.876.063.238
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	82.461.229.048	DAU, DBHCHT, Pajak Rokok, DID, DAK		100	71.225.430.344
				Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (incidence Rate/IR)	Per 100.000 Penduduk	21				21	
				CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR).	Per 100.000 Penduduk	115				115	
				Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR).	Per 100.000 Penduduk	4,1				4,1	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	unit	21	26.170.828.673	DAU, DID, DAK,		21	8.213.632.473

	-	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	unit	1	5.716.649.000	DAU, DAK		1	1.050.000.000
	-	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	unit			DAK			0
	-	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit			DID			0
	-	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	4	10.082.780.000			4	400.000.000
	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	unit	3	1.920.000.000	DID		3	500.000.000
	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	1	200.000.000			1	
	-	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit			DID			
	-	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit			DAU, DAK			

		-	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	3	4.200.000.000	DAU, DAK		3	4.200.000.000
		-	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket			DAU, DID, DAK			
		-	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	paket			DAU			
		-	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Unit	371	220.500.000	DAK		371	220.500.000
		-	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	3.830.899.673	DAU, DID, DAK		4	1.843.132.473
		-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal	Pusk	21	55.845.900.375	DAU, DBHCHT, Pajak Rokok, DAK		21	62.773.081.071
				Jumlah Desa ODF	desa/ kelurahan	139				139	
				Jumlah kasus kematian ibu	orang	17				17	
				Jumlah kasus kematian bayi	bayi	101				101	
				Jumlah kasus kematian balita	balita	108				108	
				Jumlah balita stunting	balita	5.500				5.500	

			Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue	orang	170				170	
			Jumlah semua Kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	orang	960				960	
			Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	orang	33				33	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13.200	2.510.011.000	DAU, DAK	13.200	2.579.591.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13.000	320.196.000	DAU, DAK	13.000	321.526.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	12.900	603.250.000	DAU, DAK	12.900	607.250.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	35.111	1.048.632.000	DAU, DAK	35.111	1.111.537.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	112.600	770.400.000	DAU, DAK	112.600	1.012.154.600
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	orang	580.354	541.320.750	DAU, DAK	580.354	1.130.623.750
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	80.000	452.050.000	DAU, DBHCHT, DAK	80.000	482.050.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan	orang	212.515	200.925.000	DAU, DAK	212.515	257.925.000

				kesehatan sesuai standar							
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	10.430	260.210.000	DAU, DAK		10.430	247.090.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	orang	1.853	226.070.000	DAU, DAK		1.853	152.717.500
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	9.000	313.720.000	DAU, DAK		9.000	229.870.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	15.257	139.888.000	DAU, DAK		15.257	197.155.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	1	418.566.000	DAU, DAK		1	2.446.241.163
		-	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Dokumen	1	10.000.000	DAU		1	10.000.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	1	7.871.079.000	DAU, DAK		1	7.870.290.000
		-			Dokumen	1	442.550.000	DAU, DAK		1	445.030.000

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga						
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	1	803.700.000	DAU, DAK	1	801.640.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	1	990.296.000	DAU, DAK	1	979.483.520
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Dokumen	1	28.946.500	DAU	1	
		-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	1	1.290.365.000	DAU, DAK	1	1.613.421.180
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	100	95.650.000	DAU, DAK	100	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	4	71.296.000	DAU, DAK	4	
		-	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Dokumen			DAU, DAK		
		-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2	676.748.500	DAU, DAK	2	1.404.876.700
		-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	1	29.277.630.658	DAU, DBHCHT, Pajak Rokok	1	32.277.630.658

		-	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Paket	8	25.000.000	DAU, DAK		8	
		-	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1				1	9.000.000
		-	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	2				2	180.500.000
		-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Dokumen	21	4.270.643.167	DAK		21	3.099.673.000
		-	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Dokumen	6	452.650.000	DAU, DAK		6	310.033.000
		-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	27	130.480.000	DAU, DAK		27	1.639.832.000
		-	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan	Laporan	2	160.520.000	DAU, DAK		2	282.275.000
		-	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan	Dokumen	1	100.000.000	DID, DAK		1	215.375.000

		-	Pennsyediaan dan pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	926.799.800	DAU		1	849.800.000
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosa mendapatkan pelayanan	orang	1.500	247.200.000	DAU,DAK		1.736	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV mendapatkan pelayanan	orang	275	160.617.000	DAU, DAK		270	
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah penderita malaria yang ditemukan dan ditangani	orang	21	8.490.000	DAU,DAK		21	8.490.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	dok	1	177.000.000	DAU		1	210.216.800
				Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2				2	
		-	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Dokumen	1		DAU		1	
		-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	177.000.000	DAU		1	210.216.800
		-	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	Unit	1		DAU		1	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasyankes yang berijin	Fasyankes	51	267.500.000	DAU		54	28.500.000

		-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Unit	45	11.500.000	DAU		45	11.500.000
		-	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasyankes yang dimonitor	Unit	24	256.000.000	DAU		24	17.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	99,01	1.531.346.000	DAU		99,34	503.633.000
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	orang	610	30.350.000	DAU		680	251.990.000
				Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	Orang	100				130	
		-	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Dokumen	1	15.000.000	DAU		1	15.000.000
		-	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Dokumen	1	15.350.000			1	236.990.000
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	dokumen	1	118.100.000	DAU		1	128.100.000

		-	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	1	20.100.000	DAU		1	20.100.000
		-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	Orang	2.020	98.000.000	DAU		2.020	108.000.000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	nakes	40	1.382.896.000	DAU		40	123.543.000
		-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Orang	1	1.382.896.000	DAU		1	123.543.000
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	100	715.355.800	DAU,DAK		100	428.926.000
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek yang berijin	Apotik	72	115.130.000	DAU,DAK		73	47.900.000
				Jumlah Toko Obat yang berijin	Toko obat	4				4	
				Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	Toko alkes/optikas	13				13	
		-			Dokumen	127	115.130.000	DAU		127	47.900.000

			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
		-	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana			DAU			
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat	sertifikat	220	274.109.300	DAU,DAK		220	204.386.000
		-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman	Dokumen	70	274.109.300	DAU,DAK		70	204.386.000

			Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga						
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	TPM	420	44.500.000	DAU	440	44.500.000
		-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	44.500.000	DAU	1	44.500.000
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	PIRT	28	281.616.500	DAU, DAK	30	132.140.000
		-	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan- minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Unit	76	281.616.500	DAU, DAK	76	132.140.000
		-	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah data perizinan industri rumah tangga yang dikelola dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Dokumen			DAU, DAK	1	
						11,74	920.524.000	DAU, DAK	12,24	609.650.000

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	per 1000 balita						
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	Desa	30	55.000.000	DAU		32	55.000.000
		- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	1	55.000.000	DAU		1	55.000.000
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	dokumen	2	625.524.000	DAU, DAK		2	328.750.000
		- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Dokumen	1	625.524.000	DAU, DAK		1	328.750.000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	posyandu	600	240.000.000	DAU, DAK		650	225.900.000
		- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	240.000.000	DAU, DAK		1	225.900.000
		TOTAL ANGGARAN				210.728.683.339				184.643.159.113

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2024 tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan adalah :

1. Perwujudan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024-2026.
2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Batang khususnya dalam bidang kesehatan.
4. Pelaksanaan program prioritas kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran prioritas pembangunan daerah, program kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Kesehatan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Kesehatan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Batang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

B. Rencana Tindak Lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Batang, Juli 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG

dr. Didiet Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 200604 1 013